

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI  
MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TAX  
PLANNING***

**(Studi Beberapa Perusahaan Industri Kimia yang terdaftar di  
Disperindag Surabaya 2010)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**JOFITA MEIDA KADARIYANTY**  
**0713010070/FE/EA**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
2011**

## **USULAN PENELITIAN**

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TAX* *PLANNING***

**(Studi Beberapa Perusahaan Industri Kimia yang terdaftar di  
Disperindag Surabaya 2010)**

**Diajukan Oleh :**

**JOFITA MEIDA KADARIYANTY  
0713010070/FE/EA**

**telah disetujui untuk lisan oleh:**

**Pembimbing Utama**

**Dra.Ec.Dwi Suhartini, Maks  
NIP. 030 226 900**

**Tanggal :.....**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Akuntansi**

**Dr. Sri Trisnaningsih, MSi  
NIP. 19650929 199203 2001**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI  
MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TAX*  
*PLANNING***

**(Studi Beberapa Perusahaan Industri Kimia yang terdaftar di  
Disperindag Surabaya 2010)**

**Diajukan Oleh :**

**JOFITA MEIDA KADARIYANTY  
0713010070/FE/EA**

**Telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh:**

**Pembimbing Utama**

**Dra.Ec.Dwi Suhartini, Maks  
NIP. 030 226 900**

**Tanggal :.....**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Akuntansi**

**Dr. Sri Trisnaningsih, MSi  
NIP. 19650929 199203 2001**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI  
MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TAX  
PLANNING***

**(Studi Beberapa Perusahaan Industri Kimia yang terdaftar di  
Disperindag Surabaya 2010)**

**Diajukan Oleh :**

**Diajukan Oleh :**

**JOFITA MEIDA KADARIYANTY  
0713010070/FE/EA**

**Telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh:**

**Pembimbing Utama**

**Dra.Ec.Dwi Suhartini, Maks  
NIP. 030 226 900**

**Tanggal :.....**

**Mengetahui  
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “UPN” Veteran  
Jawa Timur**

**Drs. Rahman Amrullah Suwaidi, MS  
NIP. 1960003301986031003**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI  
MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TAX*  
*PLANNING***

**(Studi Beberapa Perusahaan Industri Kimia yang terdaftar di  
Disperindag Surabaya 2010)**

**Diajukan Oleh :**

**JOFITA MEIDA KADARIYANTY  
0713010070/FE/EA**

**Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur:**

Pembimbing  
Pembimbing Utama

Tim Penguji  
Ketua

Dra.Ec.Dwi Suhartini, Maks

Drs. Ec. Sjarief Hidajat, Msi

Sekretaris

Dra.Ec.Dwi Suhartini, Maks  
Anggota

Dra. Dyah Hari S, Msi, AK

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional "UPN" Veteran  
Jawa Timur

Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM  
NIP. 196309241989031001

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN TAX PLANNING (Studi Beberapa Perusahaan Industri Kimia yang Terdaftar di Disperindag Surabaya 2010)**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Keberhasilan menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. DR. Sri Trisnaningsih SE, MSi, selaku Kepala Program Studi Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dra. Ec. Dwi Suhartini, Maks, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan penelitian ini.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Ayahanda dan Ibunda, tiada kata ucapkan selain kata terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena beliaulah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan semangat baik materiil maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Keluarga besar Paduan Suara “Gita Widya Giri” UPN “Veteran Jawa Timur. Bpk. Ig. Irwan selaku Pelatih, Ibu Rochani selaku Pembina, alumni serta anggota aktif yang telah memberikan beribu kenangan yang membekas dihati. Aku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah PS GWG.
8. Sahabat-sahabat terbaikku yang luar biasa baik untuk selalu memberi aku canda dan tawa, perhatian dan motivasi demi kelancaran skripsi ini: Yuangga, Gigih, Dicky, Ristin, Sealy, Rizkie, Maryo, Rangga, Hesti, Risan, Fitri, Indah, Oecup, Suci, Devi, adek-adek PS GWG, Bebe.
9. Dan berbagai pihak yang turut membantu demi terselesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disusun dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan pihak lain.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat memberi sumbangan yang berguna bagi almamater tercinta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, Juni 2011

Penulis



# **ANALYSIS MOTIVATING FACTORS OF COMPANY MANAGEMENT TO DO TAX PLANNING**

**(Study of Chemical Industrial Company that Registered in Disperindag  
Surabaya 2010)**

**Meida Jofita Kadariyanty**

## **ABSTRACT**

Tax Planning is a medium to fulfill tax obligations but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. In 2010, the realization of tax revenues at Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Surabaya was only 92% of the target set. One factor that could lead to unachieved target is the tax planning that done by some companies. The purpose of this study is to analyze the factors that motivate company management to do tax planning in chemical industry that registered in Disperindag Surabaya in 2010.

The data used in this study are primary data obtained from the questionnaires. Respondents are the employees that work on finance or tax department on medium and large chemical industry company that listed Disperindag in 2010 which has been implementing tax planning, with the 32 respondents. Analysis technique used is multiple linear regression analysis.

The conclusion of the analysis is that the tax policy and tax law are not the motivating factor in the company's management to tax planning, while the tax administration is a factor that can motivate the management firm in doing tax planning, so the hypothesis that tax policies, tax laws, and tax administration are all factors that motivate company management in doing tax planning in a chemical industry company registered in Disperindag Surabaya 2010. The hipotesis proposed in this study was not verified.

**Key Word: Tax Policy, Tax Law, Tax, Tax Planning**

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TAX PLANNING***

**(Studi Beberapa Perusahaan Industri Kimia yang Terdaftar di  
Disperindag Surabaya 2010)**

**Jofita Meida Kadariyanty**

## **ABSTRAK**

*Tax Planning* adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (tidak melanggar undang-undang) tetapi jumlah yang pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya hanya 92% dari target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut adalah *Tax Planning* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan *Tax Planning* dalam beberapa perusahaan Industri Kimia di Disperindag Surabaya tahun 2010.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Responden penelitian adalah bagian keuangan atau perpajakan pada Perusahaan Industri Kimia menengah dan besar yang terdaftar di Disperindag tahun 2010 dan sudah menerapkan *Tax Planning*, dengan jumlah responden sebanyak 32 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan bukan merupakan faktor yang memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *Tax Planning*, sedangkan administrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *Tax Planning*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan merupakan faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *Tax Planning* di beberapa Perusahaan Industri Kimia yang terdaftar di Disperindag

Surabaya 2010, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tidak teruji kebenarannya.

**Key Word :** Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Tax Planning*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	xv
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3.Batasan Penelitian.....	10
1.4.Tujuan Penelitian .....	10
1.5. Manfaat Penelitian .....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
2.1.1. Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	16
2.2. Landasan Teori .....	18
2.2.1. Perencanaan Pajak .....	18
2.2.1.1. Pengertian Perencanaan Pajak .....	18
2.2.1.2. Tujuan Perencanaan Pajak .....	20

2.2.1.3. Prinsip Perencanaan Pajak .....	21
2.2.1.4. Pola Perencanaan Pajak.....	23
2.2.1.5. Sasaran Perencanaan Pajak .....	24
2.2.1.6. Strategi Perencanaan Pajak .....	25
2.2.1.7. Penyusunan dalam Perencanaan Pajak.....	26
2.2.1.8. Sistem Pemungutan pajak dalam perencanaan pajak.....	29
2.2.2. Strategi-Strategi yang dapat digunakan dalam Perencanaan Pajak .....	30
2.2.2.1. Memanfaatkan Kemudahan yang disediakan Ketentuan Perpajakan .....	30
2.2.2.1.1. Upaya Menyelenggarakan Pembukuan .....	31
2.2.2.1.2. Manfaatkan Sunset Policy .....	31
2.2.2.1.3. Manfaatkan Batas Akhir Pembayaran (Last Minute <i>Tax Planning</i> ) .....	32
2.2.2.2. Memanfaatkan Kelonggaran Terhadap Pemilihan Metode Akuntansi .....	32
2.2.2.2.1. Pemilihan Metode Penilaian Persediaan yang Menguntungkan .....	33
2.2.2.2.2. Pemilihan Metode Penyusutan dan Amortisasi yang Menguntungkan.....	33

2.2.2.3 .Memanfaatkan Perbedaan Perlakuan Pajak	
atas Bentuk Perusahaan.....	34
2.2.2.3.1.Menentukan Orang Pribadi atau Badan	
Atas Pertimbangan Tarif Pajak.....	34
2.2.3.2. Memilih Perseroan Komanditer (CV)	
Dibanding Perseroan Terbatas (PT).....	34
2.2.2.4. Memanfaatkan Perbedaan Perlakuan Pajak	
Terhadap Penghasilan .....	35
2.2.2.4.1. Konsentrasi pada Produk Berpajak Rendah	36
2.2.2.5. Memanfaatkan Perbedaan Perlakuan Pajak	
Terhadap biaya .....	36
2.2.2.5.1.Optimalisasi Biaya Karyawan.....	37
2.2.2.6. Menghindar Pemeriksaan Pajak.....	38
2.2.2.7. Menjaga Hubungan Baik dengan Administrasi	
Perpajakan.....	39
2.2.3. Pengertian Manajemen Pajak .....	39
2.2.3.1.Peranan Manajemen Pajak .....	40
2.2.4.Aspek Formal dan Administratif <i>Tax Planning</i> .....	42
2.2.5.Aspek Material dalam <i>Tax planning</i> .....	43
2.2.6. Penghindaran Sanksi Pajak.....	43
2.2.7. Motivasi <i>Tax Planning</i> .....	45
2.2.7.1. Definisi Motivasi.....	45



2.7. Hipotesis .....	68
----------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	69
3.1.1. Definisi Operasional .....	69
3.2. Pengukuran Variabel .....	70
3.3. Teknik Penentuan Sampel .....	71
3.3.1. Populasi .....	71
3.3.2. Sampel .....	72
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	73
3.4.1. Jenis Data .....	73
3.4.2. Sumber Data .....	73
3.4.3. Cara Pengumpulan Data .....	73
3.5. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis .....	74
3.5.1. Uji Analisis .....	74
3.5.2. Uji Asumsi Klasik .....	75
3.5.3. Teknik Analisis .....	77
3.5.4. Uji Hipotesis .....	78
3.5.4.1. Uji Kesesuaian Model .....	78
3.5.4.2. Uji Parsial .....	79

### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian .....	80
---------------------------------------	----



4.2. Deskripsi Karakteristik Responden .....	82
4.2.1. Jenis Kelamin .....	83
4.2.2. Usia.....	83
4.2.3. Lama Bekerja.....	84
4.2.4. Pendidikan Terakhir .....	85
4.3. Deskripsi Jawaban Responden .....	85
4.3.1. Kebijakan Perpajakan ( $X_1$ ) .....	86
4.3.2. Undang-Undang Perpajakan ( $X_2$ ).....	87
4.3.3. Administrasi Perpajakan ( $X_3$ ).....	88
4.3.4. Motivasi <i>Tax Planning</i> (Y).....	89
4.4. Uji Validitas dan Realibilitas	
4.4.1. Uji Validitas.....	90
4.4.2. Uji Reabilitas .....	92
4.5. Uji Normalitas .....	93
4.6. Uji Asumsi Klasik .....	94
4.6.1. Multikolinieritas .....	94
4.6.2. Heteroskedasitas .....	95
4.6.3. Autokorelasi.....	96
4.7. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	97
4.7.1. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda .....	97
4.7.2. Uji Hipotesis .....	99
4.7.2.1. Uji Kesesuaian Model ( Uji F) .....	99

4.7.2.2. Uji Parsial (Uji t).....	101
4.8. Pembahasan Hasil Penelitian.....	103
4.8.1. Implikasi Penelitian .....	103
4.8.2. Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya .....	105
4.8.3. Konfirmasi Hasil Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	108
4.8.4. Keterbatasan Penelitian .....	109
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan.....	110
5.2. Saran .....	111
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	112
 <b>KUESIONER</b> .....	

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 2.1. Diagram Kerangka Pikir.....	68
---	----



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 2.1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Sekarang .....	16
Tabel 3.1. Deteksi adanya Autokorelasi dengan Kriteria Durbin- watson .....	77

Tabel 4.1. Perusahaan Industri Kimia yang Terdaftar di Disperindag Surabaya 2010 .....	82
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	83
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasrkan Usia .....	83
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	84
Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	85
Tabel 4.6.Deskripsi Variabel Kebijakan Perpajakan .....	86
Tabel 4.7.Deskripsi Variabel Undang-Undang Perpajakan .....	87
Tabel 4.8. Deskripsi Variabel Administrasi Perpajakan .....	88
Tabel 4.9. Deskripsi Variabel Motivasi <i>Tax Planning</i> .....	89
Tabel 4.10. Hasil Uji Variabel Kebijakan Perpajakan .....	90
Tabel 4.11.Hasil Uji Variabel Undang-undang Perpajakan.....	91
Tabel 4.12. Hasil Uji Variabel Administrasi Perpajakan.....	91
Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas Motivasi <i>Tax Planning</i> .....	92
Tabel 4.14. Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian .....	93
Tabel 4.15. Hasil Uji Normalitas .....	94
Tabel 4.16. Hasil Uji Multikolinieritas .....	95
Tabel 4.17. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	96
Tabel 4.18. Hasil Uji Autokorelasi .....	97
Tabel 4.19. Hasil Estimasi Koefisien Regresi.....	98
Tabel 4.20. Hasil Analisis Hubungan Kesesuaian Model.....	100
Tabel 4.21. Nilai Koefisien Determinasi (R Square) .....	101

Tabel 4.22. Hasil Analisis Variens Hubungan Secara Parsial .....	104
Tabel 4.23. Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang Dilakukan Sekarang .....	106



## **DARTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Data Penelitian

Lampiran 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik

Lampiran 3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Lampiran 4. Uji Validitas

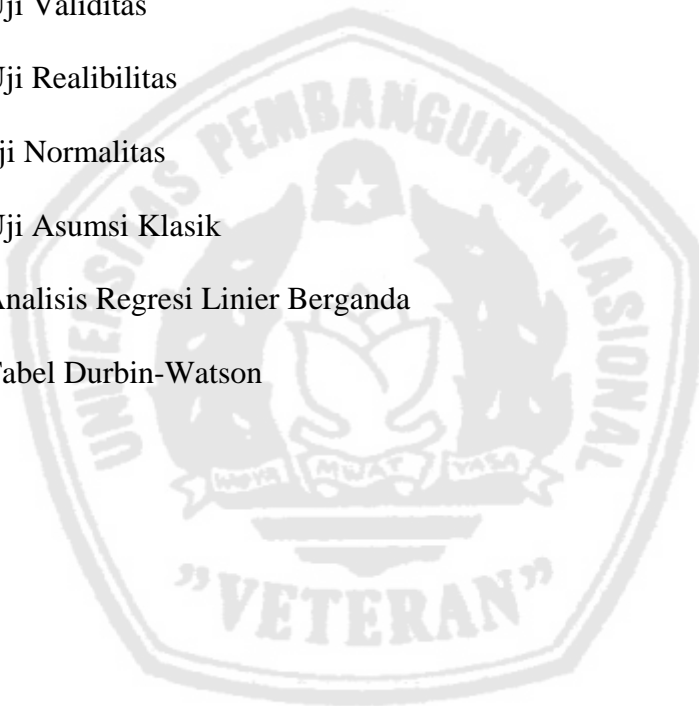
Lampiran 5. Uji Realibilitas

Lampiran 6. Uji Normalitas

Lampiran 7. Uji Asumsi Klasik

Lampiran 8. Analisis Regresi Linier Berganda

Lampiran 9. Tabel Durbin-Watson



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah biaya yang dipungut dari rakyat untuk pemasukan negara. Seperti yang dikatakan oleh Mardiasmo (2009:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi budgetir), dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial (fungsi reguler) (Mardiasmo, 2009:2).

Berdasarkan aspek ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, sedangkan berdasar dari aspek keuangan, pajak dianggap bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Hal ini karena kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih menjadikan pajak sebagai primadona negara. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak negara, akan semakin tinggi *tax ratio*. *Tax ratio* yaitu perbandingan antara

penerimaan pajak dan jumlah produk domestik bruto (PDB) di Indonesia baru mencapai 11,1% yang diharapkan *tax ratio* meningkat untuk setiap tahunnya, sehingga dapat tercipta kemandirian dalam pembiayaan nasional (Waluyo, 2008).

Dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa pengeluaran-pengeluaran rutin serta pembiayaan pembangunan nasional negara kita dipengaruhi oleh besarnya pajak sebagai penerimaan negara. Ini sebabnya pajak dikatakan sangat penting bagi negara kita.

Namun hal ini sangat bertolak belakang bagi suatu perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Mardiasmo, 2009:1). Dalam perusahaan jumlah pajak yang harus disetorkan tergantung dari besar kecilnya laba perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula jumlah kewajiban pajak yang harus disetorkan.

Membayar pajak, hampir semua orang tidak menyukainya karena dengan membayar pajak berarti 'kehilangan' uang keuntungan yang didapat dari usaha, terlebih berusaha pada saat-saat yang kritis seperti ini. Namun dengan demikian, amatlah tidak mungkin bagi seorang pengusaha yang legal untuk menghindari pajak, karena walau bagaimanapun pajak tetaplah menjadi kewajiban sebagai warga negara, bahkan salah satu slogan Direktorat Jendral Pajak adalah Bersama Membangun Bangsa mengisyaratkan bahwa wajib pajak sangat diharapkan berperan dalam pembangunan bangsa melalui ketaatannya dalam membayar pajak (Hidayat, 2003).

Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian



kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Zain, 2005:43). Selain itu diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga pendapatan negara di sektor penerimaan akan terus meningkat.

Namun yang terjadi realisasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dalam melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakan perusahaan masih saja berusaha untuk membayar pajaknya serendah mungkin karena mereka berpendapat bahwa membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan wajib pajaknya (Hardika, 2007).

Dengan adanya kondisi ini tidak banyak juga perusahaan yang membuat strategi penghematan pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknnya. Di dalam kamus strategi penghematan pajak (*tax saving*) selain *tax management* masih terdapat beberapa istilah lain seperti *tax avoidance*, *tax planning*, *tax mitigation*, *tax shifting*, *tax shelter*, *tax flight*, dan *tax eavsion*. Simon James dan Christoper Nobes memisahkan *tax avoidnce* dan *tax evasion* (Suandy, 2006). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) menunjuk pada rekayasa pajak yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan (*lawfull*) sedangkan *tax evasion* (penyelendupan pajak) berada di luar bingkai peraturan perpajakan (*unlawfull*). *Tax Planning* (perencanaan pajak) adalah bentuk penghalusan dari *tax avoidance* (Hardika, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penghematan pajak atau minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang

masih sesuai dengan peraturan perpajakan (*lawfull*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*). Yang dimaksud dengan melanggar peraturan perpajakan di sini adalah di mana sebuah perusahaan berusaha meminimalisasi jumlah laporan hasil labanya, sehingga perusahaan tersebut dapat melaporkan jumlah kewajiban pajaknya relatif lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Tindakan seperti ini yang dinamakan *tax evasion* (penyelundupan pajak), sedangkan upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang perpajakan biasa disebut dengan *tax planning*.

*Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43).

Seperti yang dinyatakan oleh Lumbantoruan (1996:354) bahwa manajemen pajak (*tax planning*) adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (tidak melanggar undang-undang) tetapi jumlah yang pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Salvianti (2010), perencanaan dan manajemen pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen

pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak.

Pada umumnya *tax planning* (perencanaan pajak) selalu dimulai dengan apakah suatu transaksi termasuk fenomena kena pajak atau tidak. Kalau fenomena pajak tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya. Pernyataan ini bukanlah mengajarkan perusahaan untuk melakukan kecurangan tentang pembayaran pajak namun suatu kritikan yang diharapkan dapat memotivasi perusahaan melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) yang sesuai dengan undang-undang perpajakan (Chandra, 2009).

Berdasarkan unsur-unsur perpajakan menurut Suandy (2006:1), terdapat tiga unsur perpajakan yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak yakni, kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*).

Dalam menyusun *tax planning* yang tidak melanggar aturan pajak dan undang-undang, paling tidak ada lima persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengerti peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait. Hal ini karena akan sangat sulit melakukan *tax planning* yang tidak melanggar aturan jika dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning*. Yang ketiga, harus memahami karakter usaha wajib pajak. Karena hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku (*behavior*), hal ini juga dapat membantu

*tax planning*. Yang keempat, memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur *tax planning*. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan kecurigaan serta indikasi kecurangan pajak pada saat dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Yang kelima, *tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai, seperti faktur, perjanjian dan sebagainya (Hidayat, 2005).

Ada beberapa cara yang diperkenankan dalam *tax planning* menurut Lumbantoruan (1996:485—486). Pertama, mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi penerimaan dengan jumlah biaya, misalnya pendidikan, perbaikan motor, dan lain-lain. Maksudnya, daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Kedua, mengambil keuntungan dari pemilihan perusahaan yang tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun melebihi Rp 600 juta dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 15%. Ketiga, mendirikan perusahaan dalam satu jalur agar diatur penggunaan tarif pajak, potensi pengasilan, kerugian, dan aktiva yang bisa dihapus. Keempat, menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah klasifikasi kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan, pembayaran pajak bisa ditunda. Penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan, dan menggeser menjadi penghasilan pajak tahun berikutnya (Hidayat, 2005).

Area pajak yang dapat dilakukan *tax planning* yakni, PPh 21 dengan memanfaatkan fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah secara maksimal. Misalnya membuat sistem penggajian yang diselaraskan dengan fasilitas tersebut. PTKP karyawan agar dimaksimalkan untuk mengurangi jumlah pajak terutang. PPh Badan dalam tahun berjalan, dengan menunda faktur, beban dipercepat, penyusutan mengambil tarif paling tinggi (saldo menurun), perolehan aktiva dimajukan agar dapat segera disusutkan, pembiayaan pembelian aktiva dengan mengangsur (*leasing*). PPN dan PPn BM, dengan memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan, perusahaan sebaiknya memperoleh barang dan jasa kena pajak (BKP/ JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar pajak masukannya dapat dikreditkan. Jangan sampai ada Faktur Pajak Masukan yang tidak dikreditkan karena keteledoran. Selain itu, dalam penjualan BKP/ JKP. Ini akan menunda pengakuan pendapatan PPN Keluaran (Hidayat, 2005).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ismarita (2007) tentang Pengaruh Penerapan *Tax Planning* Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan menyimpulkan bahwa sebelum penerapan *tax planning* laba perusahaan pada tahun 2005 sebesar Rp 2.588.978.000,00. Sedangkan laba perusahaan setelah penerapan *tax planning* sebesar Rp 2.195.985.800,00. Terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang sebelum dan sesudah penerapan *tax planning*. Selisih atau penghematan PPh terutang perusahaan tahun 2005 sebesar Rp 392.992.200,00. Dengan demikian terjadi penghematan pajak perusahaan sebesar 8,21%.

Implementasi dari penelitian ini adalah bahwa *tax planning* dapat dipergunakan sebagai sarana pengelolaan pajak yang dapat menunjang efisiensi beban pajak perusahaan. Selain itu *tax planning* merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan partisipasi aktif dalam aktivitas perpajakan secara terkendali dan terencana.

Dalam penelitian Mangunsong, 2002 tentang Peranan Tax Planning Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan juga membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak. Hal ini didasarkan pada hasil uji t dua rata-rata 6,578 yang berada pada daerah penolakan  $H_0$  yaitu  $6,578 > 4,303$  sehingga perbedaan atau selisih laba yang terjadi signifikan menurut uji statistik yang dilakukan. Selisih laba signifikan ini mengakibatkan laba kena pajak PT Sepatu Bata Tbk menjadi besar. Selain itu *Tax planning* mempunyai peran dalam mengefisiensikan pembayaran beban pajak penghasilan pada PT. Sepatu Bata Tbk. Hal ini terlihat dengan selisih pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada tahun 1995 sebesar Rp 1.606.863.000,00 tahun 1996 sebesar Rp 1.830.437.000,00 dan tahun 1997 sebesar Rp 1.520.395.000,00 selisih tersebut diuji dengan t dua rata-rata maka didapat t hitung sebesar 6,578 yang berada pada daerah penolakan  $H_0$  yaitu  $6,578 > 4,303$  sehingga perencanaan pajak (*tax planning*) dikatakan efisien karena menurut uji statistik yang dilakukan pajak penghasilan sebelum *tax planning* berbeda signifikan dengan pajak penghasilan setelah menggunakan *tax planning*.

Kepala Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Suharno mengatakan, bahwa Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 12,5 triliun pada tahun ini. Pada 2010, realisasi penerimaan pajak di Surabaya mencapai Rp 11,3 triliun atau 92% dari target sebesar Rp 12,4 triliun. Terkait realisasi penerimaan pajak 2010 yang hanya 92% dari target. Suharno mengatakan, hal itu dipicu oleh adanya lonjakan target dari 2009 ke 2010. Pada 2009, target penerimaan pajak sebesar Rp 9,7 triliun, lalu naik drastis menjadi Rp 12,4 triliun pada 2010, padahal kenaikan penerimaan pajak dari 2008 ke 2009 hanya sebesar Rp 300 miliar (<http://bataviase.co.id/node/548226>).

Berdasarkan paparan di atas bisa disimpulkan kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa faktor yang kemungkinan salah satunya dari kebijakan manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*, karena memang pada dasarnya kebijakan ini tidak menyalahi peraturan yang ada. Namun perusahaan berupaya melakukan penghematan pajak yang selanjutnya berdampak pada penerimaan pajak negara.

Dengan beberapa uraian di atas *tax planning* merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan manajemen perusahaan yang menitikberatkan *tax planning* sebagai suatu cara untuk penghematan pajak.

Penekanan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memotivasi perusahaan melakukan *tax planning* yang didasarkan pada ungkapan Suandy (2006:11) bahwa motivasi *Tax Planning* dipengaruhi oleh: 1) kebijakan perpajakan,

2) undang-undang perpajakan, 3) administrasi perpajakan. Fenomena faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan *tax planning* bukan sekedar terdiri dari 3 tapi terdiri dari 4 faktor yaitu: 1) kebijakan perpajakan, 2) undang-undang perpajakan, 3) administrasi perpajakan, 4) beban pajak (Chandra, 2009).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN TAX PLANNING (Study beberapa Perusahaan Industri Kimia yang terdaftar di Disperidag Surabaya tahun 2010**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan dapat memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan *tax planning* dalam beberapa perusahaan industri kimia yang terdaftar di Disperindag Surabaya tahun 2010?

### **1.3. Batasan Penelitian**

Penelitian ini hanya dilakukan pada seluruh perusahaan industri kimia menengah dan besar yang telah terdaftar di daerah Surabaya tahun 2010. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan perusahaan telah menerapkan *tax planning*.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis factor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan



*tax planning* dalam beberapa perusahaan industri kimia yang terdaftar di Disperindag Surabaya tahun 2010.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi motivasi yang digunakan oleh manajemen dalam melakukan *tax planning* serta memberikan saran.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pajak.
- c. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam menganalisis permasalahan yang sama.